

KONTESTASI WACANA EKOLOGI DALAM PEMBERITAAN PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT

Muh. Ikbal¹, Andi Karman²
¹²Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹muh.ikbal@unm.ac.id, ²andikarman@unm.ac.id

ABSTRAK

Pertambangan nikel di Raja Ampat memicu konflik antara pelestarian kawasan yang ditetapkan UNESCO, wilayah adat, serta ruang hidup masyarakat dengan pengembangan nikel sebagai mineral strategis untuk hilirisasi industri dan transisi energi. Studi ini mengkaji kontestasi wacana dan perubahan konfigurasi wacana dalam 28 artikel berita lengkap yang diterbitkan antara Maret dan September 2025 oleh lima media terpilih yang mewakili empat jenis media. Kerangka analisis utama menggunakan pendekatan Fairclough, analisis klausa menggunakan teori transitivitas Halliday, evaluasi ekologis dipandu oleh pendekatan Stibbe, serta representasi aktor sosial dan legitimasi dianalisis menggunakan kerangka Van Leeuwen. Unit pengambilan sampel adalah artikel; setiap artikel utuh berfungsi sebagai unit konteks, sedangkan 84 segmen fokus yang mencakup judul/teras berita, segmen aktor-sumber, dan segmen ekologis-ideologis berfungsi sebagai unit pencatatan. Artikel diklasifikasikan berdasarkan orientasi yang sama pada setidaknya dua dari tiga segmen tersebut; kasus campuran dikategorikan sebagai ambivalen. Hasilnya menunjukkan 12 artikel bersifat kontra-wacana, delapan artikel bersifat melegitimasi, dan delapan artikel bersifat ambivalen. Legitimasi dibangun melalui otorisasi resmi, kepatuhan administratif, rasionalisasi teknis, manfaat ekonomi, pembatasan spasial, dan klaim persetujuan masyarakat. Sebaliknya, kontra-wacana mengonstruksi Raja Ampat sebagai wilayah adat dan ekosistem yang saling terhubung, menonjolkan heterogenitas masyarakat, serta mengangkat isu entitas non-manusia dan dampak ekologis. Analisis lintas fase menunjukkan adanya perubahan konfigurasi wacana yang bervariasi antar-media, bukan pergeseran seragam: ANTARA beralih dari respons krisis yang ambivalen menuju legitimasi operasional; Mongabay Indonesia dan Suara Papua tetap dominan dalam posisi kontra-wacana; sementara Tirto.id menunjukkan pola perubahan yang dinamis. Temuan ini membedakan antara legalitas administratif dan legitimasi ekologis, serta antara batas-batas izin dan konektivitas ekosistem.

Kata Kunci: *analisis wacana kritis, ekolinguistik, pertambangan nikel, Raja Ampat, representasi aktor sosial*

ABSTRACT

Nickel mining in Raja Ampat brings into conflict the construction of a UNESCO-designated area, customary territory, and living space with the construction of nickel as a strategic mineral for downstream industrialisation and the energy transition. This study examines discursive contestation and changes in discourse configuration across 28 full-text news articles published between March and September 2025 by five selected outlets representing four media types. Fairclough provides the main analytical framework, Halliday's transitivity is used for clause analysis, Stibbe guides ecological evaluation, and Van Leeuwen informs social-actor representation and legitimation. The sampling unit was the article, each full article served as the context unit, and 84 focal segments headline/lead, actor-source segment, and ecological-ideological segment served as recording units. Articles were classified when at least two of the three segments shared the same orientation; mixed cases were coded as ambivalent. Twelve articles were counter-discursive, eight legitimative, and eight ambivalent. Legitimation operated through official authorisation, administrative compliance, technical rationalisation, economic benefits, spatial delimitation, and claims of community consent. Counter-discourses constructed Raja Ampat as customary territory and an interconnected ecosystem, foregrounded community heterogeneity, and made nonhuman entities and ecological costs salient. Cross-phase analysis indicates a change in discursive configuration rather than a uniform shift across media: ANTARA moved from an ambivalent crisis response towards operational legitimation,

Mongabay Indonesia and Suara Papua remained predominantly counter-discursive, while Tirto.id displayed a changing trajectory. The findings distinguish administrative legality from ecological legitimacy and permit boundaries from ecosystem connectivity.

Keywords: *critical discourse analysis, ecolinguistics, nickel mining, Raja Ampat, social-actor representation*

PENDAHULUAN

Raja Ampat menempati posisi ekologis dan simbolik yang kuat. UNESCO menetapkan sebagai Global Geopark pada 2023, sedangkan laman *Man and the Biosphere Programme* mencatat Raja Ampat sebagai *Biosphere Reserve* dengan tahun nominasi 2025. Kawasan ini berada di pusat Segitiga Karang dan memadukan ekosistem terumbu, mangrove, lamun, hutan hujan, pulau kecil, serta sistem tenurial adat. Penelitian tentang pariwisata bahari di Misool juga menunjukkan bahwa pengetahuan adat, situs sakral, tabu penangkapan ikan, dan sasi laut merupakan bagian penting dari keberlanjutan sosial-ekologis Raja Ampat (Prasetyo et al., 2023). Karena itu, Raja Ampat lebih tepat dipahami sebagai kawasan berstatus UNESCO dan warisan ekologis global, bukan UNESCO *World Heritage Site* (UNESCO, 2023, n.d.).

Pada saat yang sama, nikel memperoleh kedudukan strategis dalam ekonomi politik Indonesia. Hilirisasi menjanjikan nilai tambah, investasi, lapangan kerja, daya saing, dan integrasi rantai nilai kendaraan listrik (Schröder & Iwasaki, 2024; Warburton, 2024). Akan tetapi, tata kelola mineral kritis menghadapi persoalan keberlanjutan pasokan, distribusi manfaat, hak pembangunan, dan risiko sosial-ekologis (Dou et al., 2023; Riggs et al., 2026). Kajian empiris menunjukkan bahwa pertambangan nikel Indonesia berkaitan dengan penurunan tutupan hutan dan hasil kesejahteraan yang campuran (Lo et al., 2024), jejak transformasi lahan yang lebih besar daripada perkiraan sebelumnya (Heijlen & Duhayon, 2024), serta dampak lingkungan dan kesehatan manusia sepanjang rantai penambangan dan pengolahan (Wahyono et al., 2024). Di Pulau Gag sendiri, penelitian terdahulu telah mendokumentasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis aktivitas pertambangan, termasuk hubungannya dengan ekosistem terumbu karang (Ulat et al., 2024).

Paradoks tersebut menjadi tajam ketika teknologi yang dipromosikan sebagai hijau secara global bergantung pada ekstraksi yang memindahkan biaya ekologis dan sosial ke wilayah produksi. *Literatur green extractivism* menegaskan bahwa transisi energi dapat memperluas frontier komoditas, kompetisi modal, dan konflik distribusi ekologis (Barbesgaard & Whitmore, 2024; Dunlap et al., 2024). Resistensi masyarakat adat terhadap deforestasi akibat pertambangan juga memperlihatkan bahwa kebijakan penggunaan lahan tidak hanya menyangkut efisiensi ekonomi, tetapi juga pengakuan hak, pengetahuan, dan keadilan teritorial (Bose, 2023). Konflik komunitas di wilayah industri nikel Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan lokal tidak pernah seragam dan selalu berkaitan dengan negosiasi kekuasaan serta distribusi manfaat (Hudayana et al., 2020).

Peristiwa 2025 di Raja Ampat membentuk rangkaian diskursif yang jelas. Kementerian ESDM menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel pada 5 Juni, pemerintah mencabut empat izin pada 10 Juni tetapi mempertahankan PT Gag Nikel, dan perusahaan kembali beroperasi pada September. Greenpeace kemudian membangun wacana tandingan yang menyebut beroperasinya kembali perusahaan sebagai ancaman bagi ekosistem dan masyarakat Papua (Greenpeace Indonesia, 2025; Kementerian ESDM, 2025a, 2025c). Dalam situasi tersebut, media tidak sekadar memantulkan peristiwa. Pemberitaan menyeleksi sumber, mengatur urutan kutipan, menentukan siapa yang dapat mewakili “masyarakat”, serta memilih apakah alam tampil sebagai kehidupan, sumber daya, objek audit, atau latar. Kajian mengenai

pemberitaan kawasan lindung menunjukkan bahwa skala, sumber, dan pilihan bahasa membentuk pemahaman publik tentang pengelolaan lingkungan (Komossa et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah membuka pembahasan tersebut, tetapi belum banyak yang menggabungkan perbandingan outlet, bukti linguistik mikro, representasi manusia dan nonmanusia, serta perubahan beberapa fase peristiwa. Wahyuni dan Sugaryamah (2025) menganalisis satu video Kompas TV menggunakan *Systemic Functional Linguistics*; Arifin (2026) membandingkan sepuluh berita Tempo.co dan Detik.com pada Juni 2025; Madaraja (2025) mengkaji legitimasi dan resistensi dalam pemberitaan Raja Ampat dan Wawonii; sedangkan Werang et al. (2026) menelaah persoalan hukum dan kebijakan. Posisi penelitian ini diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Fokus, keterbatasan, dan posisi penelitian

Penelitian	Data/objek	Fokus	Keterbatasan/posisi
Wahyuni & Sugaryamah (2025)	Satu video Kompas TV, 9 Juni 2025	SFL; transitivitas dan modalitas	Tidak longitudinal dan tidak membandingkan outlet berita.
Arifin (2026)	10 berita Tempo.co dan Detik.com, Juni 2025	Framing Entman; bingkai tekno-administratif dan struktural-kritis	Terbatas pada dua outlet dan satu fase krisis.
Madaraja (2025)	Pemberitaan Raja Ampat dan Wawonii	AWK Fairclough; legitimasi dan resistensi	Belum memusatkan entitas nonmanusia dan perubahan empat fase.
Werang et al. (2026)	Dokumen hukum dan kebijakan	Analisis konseptual hukum-kebijakan	Tidak menganalisis bukti linguistik pemberitaan.
Penelitian ini	28 berita, lima outlet, Maret–September 2025	AWK ekokritis longitudinal; Fairclough, Halliday, Stibbe, dan Van Leeuwen	Menguji konfigurasi wacana, representasi masyarakat dan nonmanusia, serta relasi legalitas–ekologi.

Sumber: sintesis kajian terdahulu.

Kerangka penelitian disusun secara hierarkis. Fairclough (2003) menjadi kerangka utama untuk menghubungkan dimensi teks, atribusi sumber dan intertekstualitas yang dapat diamati, serta praktik sosial. Transitivitas Halliday digunakan sebagai perangkat mikro untuk menelusuri pembagian peran pelaku, proses, sasaran, penerima manfaat, dan keadaan dalam klausa (Halliday & Matthiessen, 2014). Stibbe (2014) digunakan untuk menilai framing, penghapusan, penonjolan, dan cerita ekologis berdasarkan *ecosophy* penelitian. Van Leeuwen melengkapi analisis melalui kategori representasi aktor serta mekanisme legitimasi, terutama otorisasi dan rasionalisasi (van Leeuwen, 2007, 2008). Pemetaan kajian menunjukkan bahwa integrasi ekolinguistik dan analisis wacana kritis berkembang, tetapi tetap memerlukan dasar ekologis eksplisit agar dimensi lingkungan tidak larut dalam kritik sosial umum (Kamarullah & Yanti, 2024).

Ecosophy penelitian mencakup empat prinsip: keutuhan ekosistem darat–laut, keadilan distribusi manfaat dan risiko, pengakuan nilai intrinsik kehidupan nonmanusia, dan keadilan antargenerasi. Hierarki tersebut mencegah penggabungan teori secara eklektik: Fairclough mengorganisasi tingkat analisis, Halliday menyediakan bukti gramatikal, Van Leeuwen menjelaskan representasi dan legitimasi, sedangkan Stibbe mengarahkan evaluasi ekologis.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana Raja Ampat, pertambangan, pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan entitas nonmanusia direpresentasikan; (2) cerita ekologis dan mekanisme legitimasi apa yang dipertentangkan; dan (3) bagaimana konfigurasi wacana berubah antar-fase dan pada outlet yang sama. Penelitian bertujuan mengungkap bukti linguistik, pola sirkulasi sumber, dan konteks sosial-ekologis

yang membentuk pertarungan makna tersebut. Kebaruan penelitian terletak pada desain komparatif-longitudinal, integrasi hierarkis empat perangkat analisis, pemisahan unit sampling, unit konteks, dan unit pencatatan, serta pemeriksaan representasi manusia dan nonmanusia secara bersamaan.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif-longitudinal terhadap lima outlet terpilih dari empat tipe media: ANTARA sebagai kantor berita nasional; Mongabay Indonesia sebagai media lingkungan; Suara Papua sebagai media lokal Papua; Tirto.id dan Media Indonesia sebagai media nasional daring. Pemilihan outlet bersifat purposif untuk menghadirkan variasi orientasi editorial dan posisi dalam sirkulasi sumber, bukan untuk menggeneralisasi seluruh tipe media.

Penelusuran dilakukan pada 20–28 Juli 2026 melalui mesin pencari umum dan fitur pencarian outlet dengan kata kunci “tambang nikel Raja Ampat”, “PT Gag Nikel”, “izin tambang Raja Ampat”, “Pulau Gag”, “ManyaiFun”, “Batang Pele”, “Save Raja Ampat”, dan “operasi kembali Gag Nikel”. Sebanyak 39 item diinventarisasi. Berita dimasukkan apabila membahas langsung pertambangan nikel di Raja Ampat, memuat sedikitnya satu aktor utama, memiliki argumentasi tentang manfaat, dampak, legalitas, masyarakat, atau lingkungan, tersedia dalam teks penuh, dan berada pada empat fase penelitian. Fase I berlangsung 11 Maret–30 Mei 2025; Fase II 31 Mei–5 Juni; Fase III 6–15 Juni; dan Fase IV 3–30 September 2025.

Unit sampling adalah 28 artikel berita teks penuh. Keseluruhan artikel menjadi unit konteks untuk menentukan makna kutipan, urutan sumber, dan orientasi. Unit pencatatan terdiri atas 84 segmen fokus: 28 judul/teras, 28 segmen aktor-sumber, dan 28 segmen ekologis-ideologis. Tiga segmen dipilih untuk menjamin keterbandingan dan auditabilitas: judul atau teras menetapkan masalah dan evaluasi awal; segmen aktor-sumber menunjukkan atribusi dan representasi; sedangkan segmen ekologis-ideologis memuat klaim lingkungan, legal, ekonomi, atau ideologis yang paling eksplisit.

Tabel 2. Operasionalisasi unit analisis dan klasifikasi wacana

Komponen	Formulasi operasional	Fungsi/batas
Unit sampling	28 artikel berita teks penuh	Objek yang dipilih dan dibandingkan.
Unit konteks	Keseluruhan teks setiap artikel	Menentukan makna kutipan, urutan sumber, dan orientasi artikel.
Unit pencatatan	84 segmen fokus: judul/teras, aktor-sumber, dan ekologis-ideologis	Segmen berupa satu atau beberapa klausa berurutan yang mengandung fenomena target.
Legitimatif	Sekurang-kurangnya dua dari tiga segmen membenarkan kelanjutan/pengelolaan tambang melalui otorisasi, kepatuhan, manfaat, konsensus, atau rasionalisasi teknis.	Judul/teras tidak secara dominan mendelegitimasi operasi.
Tandingan	Sekurang-kurangnya dua segmen mendelegitimasi ekstraksi melalui risiko ekologis, hak adat, akuntabilitas, irreversibilitas, atau penonjolan nonmanusia.	Orientasi tandingan menjadi posisi dominan teks, bukan hanya satu kutipan.
Ambivalen	Tidak ada orientasi yang muncul pada sekurang-kurangnya dua segmen atau artikel mempertahankan ketegangan yang relatif setara.	Berbeda dari “berimbang” mekanis; ditetapkan dari konflik orientasi internal.
Evaluasi ecosophy	Setiap artikel dinilai terpisah berdasarkan empat prinsip ecosophy.	Membedakan posisi politik-diskursif dari konsekuensi ekologis cerita.

Sumber: hasil pengembangan kodebook penelitian.

Prosedur analisis meliputi inventarisasi, pilot coding delapan artikel, revisi kodebook, pengodean 84 segmen, agregasi posisi artikel, perbandingan antar-outlet dan antar-fase, serta negative-case analysis. Audit stabilitas internal dilakukan terhadap 24 segmen yang dipilih secara berstrata dari delapan artikel dan dikodekan ulang satu hari setelah putaran pertama dengan label awal disembunyikan. Karena intervalnya singkat dan tidak melibatkan koder independen, pemeriksaan tersebut hanya digunakan untuk menemukan kategori ambigu; nilai Kappa tidak dipakai sebagai bukti reliabilitas final. Dependabilitas diperkuat melalui kodebook operasional, jejak keputusan, pembacaan ulang konteks penuh, dan penyimpanan inventaris korpus. Pendekatan ini mengikuti kehati-hatian dalam penggunaan reliabilitas pada penelitian kualitatif (O'Connor & Joffe, 2020).

Metadata, judul, tanggal, outlet, fase, URL, status akses, dan posisi wacana seluruh korpus tersedia dalam Materi Tambahan 1. Tiga artikel Jubi dari inventaris awal dikeluarkan karena teks penuh tidak dapat diperoleh dan diaudit. Kutipan langsung dibatasi pada frasa atau klausa pendek, sedangkan analisis utama menggunakan parafrasa untuk menghormati hak cipta. Penelitian menggunakan data publik dan tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung.

HASIL

Konfigurasi Korpus Berdasarkan Fase

Korpus final terdiri atas 28 artikel dari lima outlet. Distribusi posisi wacana memperlihatkan 12 artikel tandingan, delapan legitimatif, dan delapan ambivalen. Fase III memiliki jumlah artikel terbanyak sekaligus konfigurasi paling kompetitif, sedangkan Fase IV terbelah sama antara legitimasi operasi dan wacana tandingan. Distribusi lengkap ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Fase dan posisi wacana

Fase	Legitimatif	Ambivalen	Tandingan	Total
Fase I	0	0	1	1
Fase II	0	5	2	7
Fase III	6	3	7	16
Fase IV	2	0	2	4
Total	8	8	12	28

Sumber: hasil pengodean peneliti.

Perbandingan pada outlet yang muncul dalam lebih dari satu fase menunjukkan pola yang berbeda. ANTARA berubah dari tiga artikel ambivalen pada Fase II menjadi dominan legitimatif pada Fase III–IV. Mongabay Indonesia konsisten tandingan pada Fase II–IV. Suara Papua dominan tandingan pada Fase I–III dengan satu artikel ambivalen mengenai pencabutan izin. Tirto.id bergerak dari ambivalen pada Fase II menuju dominan legitimatif pada Fase III, kemudian menerbitkan artikel tandingan pada Fase IV. Media Indonesia hanya hadir pada Fase IV sehingga tidak dapat ditarik lintasan internal.

Tabel 4. Lintasan posisi wacana menurut outlet

Outlet	Fase hadir	Distribusi	Lintasan
ANTARA	F2–F4	F2: 3A; F3: 3L, 1A; F4: 1L	Ambivalen → dominan legitimatif
Mongabay Indonesia	F2–F4	F2: 1T; F3: 5T; F4: 1T	Konsisten tandingan
Suara Papua	F1–F3	F1: 1T; F2: 1T; F3: 2T, 1A	Dominan tandingan

Outlet	Fase hadir	Distribusi	Lintasan
Tirto.id	F2–F4	F2: 2A; F3: 3L, 1A; F4: 1T	Ambivalen → legitimatif → tandingan
Media Indonesia	F4	F4: 1L	Tidak tersedia lintasan internal

Keterangan: L = legitimatif; A = ambivalen; T = tandingan.

Representasi Aktor, Ruang, dan Entitas Nonmanusia

Bukti tekstual menunjukkan empat gugus temuan. Pertama, Raja Ampat dikonstruksi sebagai sumber nilai ekonomi melalui leksikon cadangan, konsesi, produksi, pendapatan, dan keuntungan, atau sebagai ruang kehidupan melalui verba ancaman, kerusakan, dan erosi. Kedua, istilah “masyarakat” digunakan sebagai subjek kolektif dalam klaim dukungan, sementara artikel tandingan memperlihatkan warga sebagai kelompok heterogen. Ketiga, legalitas dibangun melalui kepatuhan administratif, inspeksi pejabat, reklamasi, audit, dan good mining practice. Keempat, ruang dibatasi melalui lokasi izin dan posisi di luar geopark atau diperluas melalui konektivitas darat–laut, sedimentasi, karang, mangrove, pari, dan paus.

Tabel 5. Bukti tekstual utama dan fungsi diskursif

Tema	Kode dan kutipan pendek	Fitur linguistik	Fungsi diskursif
Sumber daya/ruang hidup	NAS-F3-04: “Menakar Keuntungan Antam dari Pulau Gag Raja Ampat”	Proses mental “menakar”; keuntungan sebagai objek	Menonjolkan kuantifikasi dan nilai ekonomi ruang.
Sumber daya/ruang hidup	LOK-F1-01: “Tambang ... Mengancam Lingkungan, Ekonomi Masyarakat dan Geopark”	Tambang sebagai aktor; proses material “mengancam”	Memperlihatkan tanggung jawab kausal dan ancaman majemuk.
Sumber daya/ruang hidup	LING-F3-02: “Kerusakan Tak Bakal Pulih”	Nominalisasi; modalitas kepastian	Menonjolkan irreversibilitas kerusakan.
Sumber daya/ruang hidup	NAS-F4-02: “Tambang Nikel ... Gerus Sektor Pariwisata dan Ekonomi”	Verba metaforis “gerus”	Menghubungkan dampak ekologis dan ekonomi.
Representasi masyarakat	Rilis ESDM/ANT-F3-01: “masyarakat/warga Pulau Gag minta ... dilanjutkan”	Kolektivisasi dan generalisasi	Mengubah pengalaman terpilih menjadi klaim dukungan kolektif.
Representasi masyarakat	ANT-F3-01: “Warga yang dominan merupakan nelayan”	Fungsionalisasi aktor	Mengenali warga melalui fungsi ekonomi dan relasi manfaat.
Representasi masyarakat	LOK-F3-01: “Kunjungan ... Hanya Pencitraan”	Evaluasi negatif terhadap otorisasi pertemuan	Menggugat seleksi warga dan representasi konsensus.
Legal-teknis	ANT-F3-02: “tambang ... tak bermasalah”	Modalitas kepastian dan evaluasi kategoris	Menutup keraguan sejak judul.
Legal-teknis	ANT-F3-02: “Kami lihat dari atas ... sedimentasi ... tidak ada”	Evidensialitas visual pejabat	Memberi otoritas pada inspeksi elite.
Legal-teknis	ANT-F3-03: “PT GAG Nikel tetap beroperasi”	Kontras dengan pencabutan empat izin	Membentuk perusahaan patuh sebagai pengecualian.
Legal-teknis	LING-F3-05: “Tak Ada Rekomendasi KKP”	Negasi terhadap kelengkapan legalitas	Menantang asumsi bahwa kepatuhan sudah lengkap.
Ruang/nonmanusia	LOK-F2-02: “Salah Tinjau Lokasi Tambang”	Spasialisasi lokasi inspeksi	Menjadikan lokasi sebagai penentu validitas pengetahuan.
Ruang/nonmanusia	LOK-F3-02: “Mengancam Kehidupan Pari dan Paus”	Penonjolan satwa dalam judul	Memberi salience kepada kehidupan nonmanusia.
Ruang/nonmanusia	LING-F4-01: “pintu gerbang industri ekstraktif”	Metafora gerbang	Memperluas satu izin menjadi preseden kebijakan.
Ruang/nonmanusia	ANT-F3-03: “di luar kawasan geopark”	Pembatasan administratif	Menurunkan relevansi risiko di luar batas resmi.

Kutipan dibatasi pada judul atau frasa pendek dari artikel dalam korpus.

Perubahan Konfigurasi Antar-Fase

Fase I hanya berisi satu artikel Suara Papua yang berorientasi tandingan. Fase II didominasi artikel ambivalen; outlet nasional dan ANTARA menempatkan pemerintah sebagai pemeriksa yang akan meninjau, menginvestigasi, atau mengambil langkah. Fase III memperlihatkan enam artikel legitimatif, tiga ambivalen, dan tujuh tandingan. Pada fase ini, bahasa dukungan masyarakat, kepatuhan, legalitas, dan manfaat ekonomi berhadapan dengan bahasa hak adat, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kelemahan rekomendasi sektoral, dan ancaman terhadap ekosistem pulau kecil. Fase IV terdiri atas dua artikel legitimatif dan dua tandingan.

Pada ANTARA, perubahan terlihat dari bahasa peninjauan dan investigasi pada Fase II menuju dukungan masyarakat, tambang “tak bermasalah”, kepatuhan, dan operasi yang tetap berjalan pada Fase III–IV. Tirtoid menunjukkan lintasan tidak linear: artikel ambivalen pada Fase II, dominan legitimatif pada Fase III, dan satu artikel tandingan pada Fase IV. Mongabay Indonesia dan Suara Papua menjadi kasus negatif yang mempertahankan orientasi tandingan. Dengan demikian, perubahan yang ditemukan adalah perubahan konfigurasi sumber, kosakata, dan posisi outlet, bukan pergeseran seragam seluruh media.

PEMBAHASAN

Raja Ampat sebagai Sumber Mineral dan Ruang Kehidupan

Pertarungan pertama berlangsung pada penamaan ruang dan pembagian agensi. Judul yang “menakar keuntungan” menjadikan Pulau Gag sebagai sumber nilai yang dapat dihitung melalui cadangan, produksi, penjualan, dan umur tambang. Angka tidak ideologis dengan sendirinya, tetapi pilihan mengenai apa yang dihitung dan apa yang dikeluarkan dari perhitungan membuat nilai finansial menjadi sangat menonjol. Sebaliknya, verba “mengancam” dan “menggerus” memberi tambang posisi aktor dan memperlihatkan hubungan kausal antara ekstraksi, lingkungan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat.

Pola tersebut mendukung konsep green extractivism: agenda transisi energi dapat memperluas frontier mineral dan memindahkan biaya ekologis ke wilayah produksi (Barbesgaard & Whitmore, 2024; Dunlap et al., 2024). Temuan Lo et al. (2024), Heijlen dan Duhayon (2024), serta Wahyono et al. (2024) menunjukkan bahwa manfaat ekonomi nikel berjalan bersama perubahan tutupan lahan, jejak ruang, dan dampak lingkungan-kesehatan. Dalam konteks Pulau Gag, penelitian Ulat et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa dampak sosial-ekonomi dan ekologi tidak dapat dipisahkan. Karena itu, cerita ruang kehidupan dalam korpus berfungsi mengoreksi dominasi nilai finansial dengan mengembalikan hak adat, ekosistem, pariwisata, dan generasi mendatang sebagai nilai yang harus diperhitungkan.

Perebutan Hak untuk Mewakili Masyarakat

Istilah “masyarakat” menjadi sumber legitimasi ketika pengalaman individual diperluas menjadi klaim penerimaan kolektif. ANT-F3-01 secara eksplisit bersumber dari rilis Kementerian ESDM yang menyatakan masyarakat Pulau Gag meminta penambangan dilanjutkan (Kementerian ESDM, 2025b). Artikel tersebut mengutip dua nelayan dan pernyataan pejabat, kemudian menggeneralisasikannya sebagai kehendak warga. Kolektivisasi terjadi pada perubahan dari individu menjadi “warga” atau “masyarakat”, sedangkan fungsionalisasi tampak ketika identitas warga dipusatkan pada nelayan pemasok, penerima bantuan, dan penerima manfaat perusahaan. Dalam kerangka Van Leeuwen, representasi tersebut membentuk inklusi selektif aktor dan legitimasi melalui otorisasi serta rasionalisasi (van Leeuwen, 2007, 2008).

Analisis tidak menyatakan bahwa warga pendukung tidak autentik. Persoalannya terletak pada skala representasi: pengalaman terpilih dan pertemuan yang dikurasi diperluas

menjadi konsensus komunitas. Media lokal dan lingkungan lebih sering menghadirkan masyarakat sebagai kelompok heterogen—pemilik hak, nelayan, petani, pelaku wisata, pemuda, perempuan, dan kelompok adat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan lokal terhadap industri nikel berhubungan dengan negosiasi kekuasaan dan distribusi manfaat (Hudayana et al., 2020), serta dengan kajian mengenai resistensi masyarakat adat terhadap perubahan penggunaan lahan akibat pertambangan (Bose, 2023). Pengetahuan dan praktik adat yang menopang pariwisata bahari Raja Ampat juga menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat direduksi menjadi penerima manfaat ekonomi tunggal (Prasetyo et al., 2023).

Legalitas Administratif, Spasialisasi, dan Legitimasi Ekologis

Wacana legitimatif tidak selalu menyangkal risiko. Risiko diubah menjadi persoalan yang dapat dikelola melalui AMDAL, reklamasi, good mining practice, PROPER, audit, pengawasan, dan pembatasan teknis. Kepastian bahwa tambang “tak bermasalah” ditopang oleh pengamatan dari atas, penilaian reklamasi, dan kepatuhan prosedural. Pola ini membentuk hierarki pengetahuan: inspeksi pejabat dan indikator teknis diposisikan lebih sah daripada pengalaman warga yang tidak dipilih, video publik, atau risiko kumulatif. Pencabutan empat izin juga bekerja secara ambivalen karena menunjukkan respons negara sekaligus membentuk diferensiasi antara perusahaan bermasalah dan PT Gag Nikel yang dinilai patuh serta dapat diawasi.

Wacana tandingan memisahkan legal compliance dari ecological legitimacy. Ketiadaan rekomendasi sektoral, kerentanan pulau kecil, partisipasi masyarakat, dan dampak lintas ekosistem digunakan untuk menunjukkan bahwa izin tidak otomatis membuktikan keamanan ekologis. Temuan ini konsisten dengan Werang et al. (2026), yang menyoroti fragmentasi kebijakan, lemahnya perlindungan lingkungan, dan konsultasi masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, tata kelola mineral kritis memerlukan mekanisme yang tidak hanya menjamin pasokan, tetapi juga hak pembangunan, keadilan, dan keberlanjutan (Dou et al., 2023; Riggs et al., 2026).

Ruang berfungsi sebagai argumen. Wacana legitimatif menggunakan batas kontrak, posisi di luar geopark, jarak dari destinasi wisata, dan lokasi inspeksi untuk membatasi area dampak. Wacana tandingan menggunakan konektivitas darat–laut untuk menghubungkan pembukaan lahan, sedimentasi, laut, terumbu karang, mangrove, hasil tangkapan, dan ekonomi warga. Perbedaan tersebut bukan sekadar perbedaan lokasi, melainkan perbedaan model ruang yang digunakan untuk mendefinisikan tanggung jawab. Dalam ecosophy penelitian, konektivitas ekologis mendukung keutuhan ekosistem, sedangkan penonjolan pari dan paus mengakui nilai intrinsik nonmanusia. Kontribusi Stibbe (2014) terlihat ketika analisis kuasa diperluas dari akses bicara manusia menuju representasi kehidupan nonmanusia.

Perubahan Longitudinal dan Kontribusi Analitis

Analisis lintas fase menunjukkan bahwa normalisasi bukan berarti isu lingkungan menghilang. Lingkungan diintegrasikan ke dalam bahasa audit, sertifikasi, pengawasan, reklamasi, dan pembatasan sehingga operasi dapat dibicarakan sebagai kegiatan yang terkendali. Pada ANTARA, perubahan dari respons krisis yang ambivalen menuju legitimasi operasional tampak pada pergeseran sumber dan kosakata. Tirto.id memperlihatkan lintasan yang dapat berbalik, sedangkan Mongabay Indonesia dan Suara Papua mempertahankan orientasi tandingan. Kasus negatif tersebut mencegah generalisasi bahwa seluruh media bergerak menuju penerimaan tambang.

Temuan ini memperluas Arifin (2026), yang menemukan perbedaan bingkai tekno-administratif dan struktural-kritis pada dua outlet dalam satu fase, dengan menunjukkan bahwa

orientasi outlet dapat stabil, berubah, atau berbalik antar-fase. Penelitian ini juga memperluas Madaraja (2025) melalui bukti mengenai klaim representasi masyarakat, nonmanusia, dan perbedaan antara spasialisasi administratif dan konektivitas ekologis. Secara teoretis, integrasi hierarkis Fairclough, Halliday, Stibbe, dan Van Leeuwen menghubungkan bukti klausa, sirkulasi sumber, dan praktik sosial-ekologis. Secara metodologis, pemisahan unit sampling, unit konteks, unit pencatatan, dan klasifikasi artikel meningkatkan transparansi analisis komparatif-longitudinal.

SIMPULAN

Pemberitaan pertambangan nikel di Raja Ampat merupakan arena kontestasi nilai dan kuasa. Raja Ampat direpresentasikan secara berlawanan sebagai sumber mineral yang dapat dikelola dan sebagai wilayah adat serta kesatuan ekologis. Mekanisme legitimasi bekerja melalui otorisasi pejabat, kepatuhan administratif, rasionalisasi teknis, manfaat ekonomi, pembatasan ruang, dan klaim dukungan masyarakat. Wacana tandingan memisahkan legalitas administratif dari legitimasi ekologis, memperlihatkan heterogenitas masyarakat, menghubungkan ekosistem darat dan laut, serta memberi visibilitas kepada hutan, karang, satwa, air, dan generasi mendatang.

Perubahan yang ditemukan bukan pergeseran seragam seluruh media, melainkan perubahan konfigurasi: ANTARA bergerak dari respons ambivalen menuju legitimasi operasi; Mongabay Indonesia dan Suara Papua relatif stabil sebagai wacana tandingan; Tirto.id menunjukkan lintasan yang berubah. Temuan ini menegaskan bahwa batas izin tidak identik dengan batas ekosistem dan bahwa pengalaman warga terpilih tidak otomatis mewakili konsensus masyarakat. Implikasi praktisnya, media perlu menyebut secara presisi siapa yang berbicara atas nama masyarakat, menguji klaim sertifikasi dan kepatuhan, serta menjelaskan keterhubungan ekologis yang melampaui batas administratif.

Keterbatasan penelitian terletak pada pemilihan lima outlet secara purposif, ketimpangan jumlah berita antar-fase, tidak adanya wawancara dengan jurnalis atau masyarakat, dan audit yang berupa stabilitas internal dengan interval singkat, bukan reliabilitas antarkoder. Penelitian berikutnya disarankan menambahkan outlet dan koder independen, menggabungkan wawancara produksi berita, serta menganalisis foto, video, dan interaksi audiens secara multimodal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2026). Framing of nickel mining coverage in Raja Ampat on Tempo.co and Detik.com. *Communicative: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(1), 139–157.
- Barbesgaard, M., & Whitmore, A. (2024). “Blood on the floor”: The nickel commodity frontier and inter-capitalist competition under green extractivism. *Journal of Political Ecology*, 31(1), 567–585. <https://doi.org/10.2458/jpe.5458>
- Bose, P. (2023). Equitable land-use policy? Indigenous peoples’ resistance to mining-induced deforestation. *Land Use Policy*, 129, 106648. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106648>
- Dou, S., Xu, D., Zhu, Y., & Keenan, R. (2023). Critical mineral sustainable supply: Challenges and governance. *Futures*, 146, 103101. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103101>
- Dunlap, A., Verweijen, J., & Tornel, C. (2024). The political ecologies of “green” extractivism(s): An introduction. *Journal of Political Ecology*, 31(1), 436–463. <https://doi.org/10.2458/jpe.6131>
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday’s introduction to functional grammar* (4th ed.). Routledge.

- Heijlen, W., & Duhayon, C. (2024). An empirical estimate of the land footprint of nickel from laterite mining in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 17, 101421. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101421>
- Hudayana, B., Suharko, & Widyanta, A. B. (2020). Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), 1547–1556. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.012>
- Kamarullah, K., & Yanti, L. A. (2024). Mapping the intersection of ecolinguistics and critical discourse analysis: A bibliometric approach. *Sawerigading*, 30(1), 56–74. <https://doi.org/10.26499/sawer.v30i1.1257>
- Komossa, F., Kong, I., & Purves, R. S. (2024). What's in the news? A multiscalar text analysis approach to exploring news media discourses for managing protected areas in Switzerland. *Landscape Research*, 49(6), 823–850. <https://doi.org/10.1080/01426397.2024.2358234>
- Lo, M. G. Y., Morgans, C. L., Santika, T., Mumbunan, S., Winarni, N., Supriatna, J., Voigt, M., Davies, Z. G., & Struebig, M. J. (2024). Nickel mining reduced forest cover in Indonesia but had mixed outcomes for well-being. *One Earth*, 7(11), 2019–2033. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010>
- Madaraja, M. (2025). Konstruksi legitimasi dan resistensi dalam pemberitaan tambang nikel di Raja Ampat dan Wawonii: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2, 702–714.
- O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919899220>
- Prasetyo, N., Filep, S., & Carr, A. (2023). Towards culturally sustainable scuba diving tourism: An integration of Indigenous knowledge. *Tourism Recreation Research*, 48(3), 319–332. <https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1925830>
- Riggs, R. A., Langston, J. D., Foran, T., Grigg, N., Mboringong, F. A., Munera-Roldan, C., & Chakori, S. (2026). Grounding critical minerals in values-centred approaches for just sustainability transitions. *Sustainability Science*, 21, 305–323. <https://doi.org/10.1007/s11625-025-01726-3>
- Schröder, M., & Iwasaki, F. (2024). From nickel to electric cars? Indonesia's resource cum automotive industry policy. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 29(4), 2065–2086. <https://doi.org/10.1080/13547860.2023.2231192>
- Stibbe, A. (2014). An ecolinguistic approach to critical discourse studies. *Critical Discourse Studies*, 11(1), 117–128. <https://doi.org/10.1080/17405904.2013.845789>
- Ulat, M. A., Handayani, H., Mulya, A., Poltak, H., & Ismail, I. (2024). Analysis of the social, economic, and ecological impact of mining activities of PT. Gag Nickel on society and coral reef ecosystem in Gag Island, Raja Ampat District. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(10), 3731–3746. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i10.11612>
- van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and communication. *Discourse & Communication*, 1(1), 91–112. <https://doi.org/10.1177/1750481307071986>
- van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.
- Wahyono, Y., Sasongko, N. A., Trench, A., Anda, M., Hadiyanto, H., Aisyah, N., Anisah, A., Ariyanto, N., Kumalasari, I., Putri, V. Z. E., Lestari, M. C., Panggabean, L. P., Ridlo, R., Sundari, S., Suryaningtyas, A. D., Novianti, E. D., Hakim, M. R. F., Prihatin, A. L., & Matin, H. H. A. (2024). Evaluating the impacts of environmental and human health of the

- critical minerals mining and processing industries in Indonesia using life cycle assessment. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 10, 100944. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100944>
- Wahyuni, D. P., & Sugaryamah, D. (2025). Pros and cons of nickel mining in Raja Ampat: A critical discourse analysis based on systemic functional linguistics (SFL). *Journal of English Language and Education*, 10(5), 704–707. <https://doi.org/10.31004/jele.v10i5.1077>
- Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 20, 101564. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>
- Werang, N. P. L., Putri, R. A., & Werang, M. L. F. (2026). Nickel mining and environmental trade-off in Raja Ampat Papua: A conceptual note on legal and policy. *Journal of Social and Policy Issues*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.58835/jspi.v6i1.563>

Sumber Data Daring

- Greenpeace Indonesia. (2025, September 9). Raja Ampat terancam: Kembalinya operasi PT Gag Nikel adalah bencana bagi rakyat Indonesia dan alam Papua. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65071/raja-ampat-terancam-kembalinya-operasi-pt-gag-nikel-adalah-bencana-bagi-rakyat-indonesia-dan-alam-papua/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025a, June 5). Kementerian ESDM hentikan sementara operasi PT Gag Nikel. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-hentikan-sementara-operasi-pt-gag-nikel>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025b, June 8). Ditemui Menteri Bahlil, masyarakat Pulau Gag minta penambangan nikel dilanjutkan. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ditemui-menteri-bahlil-masyarakat-pulau-gag-minta-penambangan-nikel-dilanjutkan>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025c, June 10). Pemerintah cabut empat izin perusahaan tambang di Raja Ampat. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat>
- UNESCO. (2023, May 24). Raja Ampat UNESCO Global Geopark. <https://www.unesco.org/en/iggp/geoparks/raja-ampat>
- UNESCO. (n.d.). Raja Ampat: Man and the Biosphere Programme. Retrieved July 29, 2026, from <https://www.unesco.org/en/mab/raja-ampat>